

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu hak, kewenangan dan kewajiban suatu daerah yang bersifat otonom dimana pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan urusan masyarakat setempat yang sesuai menurut ketentuan umum UU Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik et al, 2002 dalam Maemunah, 2006).

Tujuan dari Otonomi Daerah adalah menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat daerah. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah (Kameo, 2001). Agar terwujudnya kemandirian daerah Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah itu sendiri.

Berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri (Halim: 2001). Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah pasal 3, Tujuan PAD memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Setiap komponen PAD mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002).

Selain pajak daerah, retribusi daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam sumber-sumber PAD. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Menurut peraturan tersebut, jenis pendapatan retribusi daerah adalah; (1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi Jasa Umum atas jasa yang diberikan atau disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan, (2) Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta, (3) Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi pasar merupakan Salah satu objek retribusi yang selama ini dirasakan masih rendah, yang disebabkan oleh pengelolaan yang belum optimal. Pendapat ini didukung oleh relatif masih tingginya kios atau los pasar yang masih kosong, bahkan sebagian pedagang lebih menyukai untuk berjualan di badan jalan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemerintahan daerah Kota Solok perlu melakukan pengelolaan Keuangan Daerahnya secara efektif, misalnya dengan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, salah satunya berasal dari retribusi pelayanan pasar. Hal ini berdasarkan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan peluang tersendiri bagi daerah dalam rangka memperoleh pendapatan dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang untuk membiayai pembangunan daerah, artinya semakin besar dana yang dipungut dari hasil retribusi pelayanan pasar, maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah. Agar penerimaan retribusi pasar optimal, maka pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi yang ada di pasar agar bisa dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan sehingga retribusipun meningkat.

Kemampuan kota solok dalam menghimpun PAD dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri dengan didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah serta propinsi dan kabupaten-kota. Sumber-sumber keuangan yang berasal dari PAD pendanaannya diusahakan dan dikelola sendiri oleh daerah.

Keadaan ini dicerminkan oleh perkembangan peranan PAD dalam APBD kota solok selama periode tahun 2012 -2014 menunjukkan pada tahun 2012 Rp.1.885.078.972,00 terjadi peningkatan sebanyak 0,33% sedangkan pada tahun 2013 adalah Rp.2.345.573.972,00 sementara pada tahun 2014 adalah Rp.1.361.601.707,00 disini terjadi penurunan sebanyak 33,89%, terlihat bahwa terjadinya fluktuasi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota

solok. Meskipun demikian, Dari keempat pos PAD, pos retribusi daerah memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan PAD Kota Solok, terbukti pada tahun 2013 retribusi daerah mampu mencapai Rp.2.345.573.972,00. Pengelolaan retribusi daerah secara efektif dan efisien merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah serta sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan retribusi hendaknya tetap berpegang pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yang pada prinsipnya harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sampai saat ini di kota solok terdapat kawasan lingkungan pasar yang masih aktif beroperasi. Aktivitas pasar tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kota Solok berupa retribusi. Retribusi pasar meliputi retribusi harian, retribusi kebersihan, retribusi keamanan, retribusi kaki lima, uang kunci dan biaya administrasi/perpanjangan sewa-menyewa. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peningkatan penerimaan retribusi daerah mengacu kepada dua hal prinsipil, yakni aktivitas penelitian dan pengelolaan. Argumentasi ini menyatakan bahwa target penerimaan retribusi pasar harus didukung oleh penelitian atau pengamatan terhadap pasar berkenaan dengan variabel-variabel yang relevan. Selanjutnya untuk mencapai realisasi yang telah ditetapkan dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang kontribusi penerimaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. penulis mencoba membahas sejauh mana keterkaitan atau hubungan variable makro tersebut yaitu dengan judul “**ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PASAR RAYA KOTA SOLOK**”

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis mencoba merumuskan permasalahan :

1. Berapa besar potensi yang dihasilkan oleh Retribusi Pelayanan Pasar Raya Kota Solok.
2. Berapa besar tingkat Efektivitas dan Cost Recovery Retribusi Pelayanan Pasar Raya Kota Solok.
3. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Raya Kota Solok.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan diatas, maka pembahasan yang akan penulis lakukan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengukur Potensi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Solok.
2. Mengetahui tingkat Efektivitas dan Cost Recovery Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Solok.
3. Mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pemungutan retribusi pasar di kota Solok.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran kepada Dinas Pasar agar dapat lebih meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar di Kota Solok
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah ini, terutama untuk dapat mengetahui perkembangan peranan retribusi pasar Kota Solok dalam melaksanakan Otonomi Daerah.



## 1.5 Ruang Lingkup

Untuk mencapai sasaran dalam penulisan ini maka, penulis membatasi masalah, wilayah yang diteliti adalah Pasar Raya Kota Solok dan difokuskan kepada Variabel-variabel yang digunakan untuk pengukuran potensi retribusi pasar dalam penelitian ini adalah: Fasilitas Pasar, jumlah kios dan los , Tarif Retribusi, Data Penerimaan Retribusi Tahunan, Realisasi Retribusi Pasar.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas secara sistematis mengenai permasalahan yang dibahas, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

### BAB II : KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode analisis, analisis deskriptif, menghitung potensi retribusi pasar.

### BAB VI : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum daerah penelitian, keadaan demografi, analisis fasilitas pasar raya solok, analisis tarif retribusi pasar raya solok, Analisis Penerimaan tahunan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Solok Tahun 2012-2015.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Didalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

